

## **Strategi Pertahanan Tiga Matra dalam Optimalisasi Pengamanan Ibu Kota Nusantara (IKN)**

M.Gillang Ramadhan<sup>1</sup>

Universitas Riau<sup>1</sup>, m.gillang6279@student.unri.ac.id

Penulis korespondensi: **M, Gillang Ramadhan** E-mail: m.gillang6279@student.unri.ac.id

---

**INFO ARTIKEL**

Naskah diterima: 20 Juni 2024  
Naskah disetujui untuk diterbitkan: 27 Juni 2024  
Diterbitkan: Juni 2024  
Volume: 01  
Issu: 02  
DOI:

---

**KATA KUNCI**

*Center of Gravity, IKN, Militer  
Pertahanan Keamanan,  
TNI*

---

**ABSTRACT**

*The plan to move Indonesia's capital city was planned and initiated by four different governments, namely during the time of Sukarno, Suharto, Susilo Bambang Yudhoyono, and Joko Widodo. In 2019 the North Penajam Paser area in East Kalimantan was designated as the location for IKN. The geographical location of the capital of the archipelago is directly adjacent to a well-organized, well-managed and modern city, namely Balikpapan in East Kalimantan, with infrastructure support in two twin and competing cities, namely Balikpapan and Samarinda. The designation of IKN as the new capital city recently creates challenges in planning defense strategies. First, the archipelago has military geographic characteristics with physical factors such as spatial relations, land area landscape, as well as coastal and sea water characteristics, which are different from Jakarta. Second, as a consequence of changes in military geography, the types of threats that allow combinations of forms of attack and targets against IKN have also changed and can be said to have multiplied. The capital city is the Center of Gravity which has an important position in supporting the sustainability of the country. Therefore, the defense of the capital needs to be supported by titles that are able to ward off the main threats in future wars. This research analyzes the steps and strategies used to deal with the vulnerable geographic location of the Indonesian Capital City (IKN). This research is descriptive qualitative research using a case study approach.*

---

### **1. LATAR BELAKANG**

Rencana pemindahan ibu kota baru Indonesia. Nusantara, sebuah nama yang sudah sering terdengar di seluruh pelosok negeri. Letak kondisi geografis Ibu kota Nusantara (IKN) persis bersebelahan dengan kota yang sudah maju dan modern, Balikpapan yang berada di Kalimantan Timur. Dukungan infrastruktur di dua kota "maju dan modern" Balikpapan dan Samarinda, sudah tersedianya infrastruktur jalan tol diantara kedua kota itu, ada bandara internasional, pelabuhan laut internasional serta adanya jembatan yang menghubungkan jalan nasional trans Kalimantan Timur-Kalimantan Selatan, akan mempermudah proses pembangunan IKN.

Menurut Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), ada beberapa alasan dan dua alasan utamanya mengapa langkah pemindahan ibukota harus

segera dilakukan. Pertama, pemindahan ibu kota negara akan mendorong indeks pembangunan di luar Pulau Jawa sehingga dapat mengurangi ketimpangan ekonomi yang terus berlanjut antara Pulau Jawa dan pulau lainnya. Tidak bisa dimungkiri jika Pulau Jawa merupakan wilayah dengan persentase penduduk yang tinggi bagi hampir 150 juta orang atau 56% dari keseluruhan total penduduk Indonesia. Tidak hanya itu, Pulau Jawa juga memberikan kontribusi bagi ekonomi terbesar yaitu 58,5% dari total Pendapatan Domestik Bruto (PDB). Kontribusi yang dihasilkan wilayah DKI Jakarta sendiri terhadap PDB nasional adalah 20,8%. Meskipun kebijakan masa lalu untuk redistribusi penduduk dan kegiatan ekonomi ke pulau-pulau lain, seperti transmigrasi, desentralisasi, dan zona ekonomi khusus, Jawa tetap menjadi kunci perekonomian Indonesia.

Sebagai salah satu negara yang saat ini sedang melakukan pemindahan ibu kota negara, Indonesia menyadari bahwa pemindahan ibu kota negara tidak hanya bicara soal pembangunan infrastruktur, sumber daya manusia, sumber daya alam, sarana dan prasarana, melainkan juga berhubungan dengan tata kelola pemerintahan seperti pertahanan dan keamanan negara sebagai syarat keberlangsungan pembangunan.

Salah satu aspek kajian yang mendukung penuh pemindahan IKN ke Kabupaten Kutai Kertanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara oleh Bappenas adalah bahwa geografi IKN yang baru dapat mempermudah optimalisasi pertahanan tiga matra yaitu matra darat, laut dan udara. Selain itu, secara geografis letaknya yang berada di tengah Indonesia lebih memudahkan dalam mengorganisasikan dan mengontrol berjalannya fungsi-fungsi pertahanan negara. dominan dalam hal populasi dan sumber daya ekonomi. (Salim & Negara, 2019).

Melihat kondisi ini, perpindahan ibu kota menghadirkan era geostrategis baru. Namun demikian, letak IKN yang strategis ini menandakan bahwa tidak bisa dimungkiri akan ada potensi dari ancaman gangguan pertahanan dan keamanan yang dilakukan oleh aktor negara dan aktor non-negara. Hal ini tidak lain karena IKN terletak di dekat Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II, sekaligus sebagai atau titik tersempit dunia.

Sementara itu, IKN dekat dengan Flight Information Region (FIR) negara tetangga, antara lain Kinabalu, Singapura, Malaysia, Filipina.

## **2. TINJAUAN LITERATUR**

Tinjauan literatur ini mengidentifikasi beragam sudut pandang dari penelitian terkini. Ada berbagai pandangan dan spekulasi terkait rencana perpindahan ibu kota negara, kemajuan dalam pemahaman perpindahannya, kebutuhan untuk menggabungkan pendekatan multidisiplin termasuk militer, politik, dan ekonomi, termasuk memahami secara holistik langkah dan upaya yang akan dijalankan militer Indonesia.

Kajian Permana Silitonga (2033) memberikan informasi mengenai gambaran perpindahan ibu kota negara, dan aspek-aspek mengenai implikasi pemindahan ibukota yang akan terjadi baik sebelum, saat dan sesudah berpindahanya IKN.

Sementara Makmur Supriyatno (2013) meneliti dan meninjau berbagai pandangan tentang geografi pertahanan dan kerangka analisis dalam rangka menganalisis kecocokan suatu daerah atau ibukota dari segi aspek pertahanan, tinjauan juga dilihat dari berbagai perspektif, salah satunya ditinjau dari demografi.

Kajian yang dilakukan Syaiful Hasan (2023) yang mengulas bagaimana kendala yang dihadapi dalam pemindahan ibu kota negara dari segi pertahanan maritime, lemahnya sistem pertahanan maritim Indonesia, alutsista apa saja yang sudah ada dan diperlukan serta sinergitas antar institusi pemerintahan dengan lembaga terkait.

Dalam tulisannya di *Harian Kompas* yang berjudul *IKN dan Pertahanan Strategis Matra Darat* oleh Dudung Abdurachman (2022) menjelaskan bahwa TNI AD sebagai komponen utama dalam pertahanan memiliki beberapa tugas yaitu melaksanakan tugas TNI matra darat di bidang pertahanan, melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan di darat, dan fungsi TNI AD dalam mengemban tugas utama pertahanan matra darat secara teritorial.

Andi Fathurrachman Batara Sulo (2022) memberikan penjelasan analisis strategi yang efektif dalam aspek pertahanan udara dan saran penambahan alutsista dan pangkalan udara yang sesuai dengan kondisi geografis IKN

Jurnal Kajian oleh Dwi Saputra (2021) Menganalisis strategi ends (Tujuan), *means* (sarana) dan *ways* (langkah) dalam upaya pemindahan IKN dari DKI Jakarta ke Kutai Kartenegara dan PPU dari perspektif ekonomi pertahanan

### 3. METODOLOGI

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan metode pendekatan studi kasus (*case study*) Menurut Creswell (2003), penelitian kualitatif merupakan proses pemahaman yang dilakukan melalui metode mencari tahu dalam mencari makna dari masalah sosial atau kemanusiaan.), penelitian kualitatif, artinya penelitian ini menjelaskan, mendiskripsikan, mencatat, menganalisis dan menginterpretasikan apa yang diteliti, melalui observasi, wawancara dan mempelajari dokumentasi. Sedangkan Studi kasus menurut Creswell (2008) merupakan strategi penelitian yang di mana di dalamnya peneliti akan menyelidiki secara teliti dan cermat terhadap suatu program, peristiwa, proses, aktifitas, atau sekelompok individu.

Penggunaan pendekatan kualitatif dengan studi kasus tersebut terbilang cocok dan sesuai untuk digunakan karena penelitian ini bertujuan untuk memahami sebuah masalah serta hubungan antarseluruh actor yang terlibat di dalamnya. Analisis permasalahan dan pembahasan dilakukan secara mendalam menggunakan berbagai jenis sumber data mulai dari observasi lapangan yang didapat dari penelitian-penelitian terdahulu, hingga wawancara mendalam dengan informan yang dilakukan oleh peneliti terdahulu yang diolah dengan alat analisis berupa deskriptif analisis, sehingga dalam merumuskan saran tindak untuk seluruh aktor yang terlibat dapat dilakukan di dalam kajian yang komprehensif dan memiliki keabsahan serta keterandalan data yang tinggi.

#### **4. HASIL DAN DISKUSI**

Upaya pemindahan ibu kota negara menjadi hal yang menarik perhatian banyak pihak, ini menjadi isu yang menarik bagi masyarakat global dan pemerintah, terlebih di daerah Kalimantan Timur. Upaya pemindahan ibu kota negara (IKN) ini sendiri telah menjadi wacana pemerintah sejak lama, namun baru belakangan ini mulai tahun 2017 melalui Kementerian PPN/Bappenas upaya tersebut kembali dimunculkan. Rencana pemindahan IKN Indonesia telah di gagaskan sejak lama, gagasan tersebut sudah lama di rencanakan oleh empat pemerintahan berbeda, yakni Soekarno, Soeharto, Soesilo Bambang Yudhoyono, dan Joko Widodo.

Pada 2019, Penajam Paser Utara di Kalimantan Timur ditetapkan sebagai lokasi IKN baru dengan nama "Nusantara". Wilayah Nusantara berada di sebelah utara Kota Balikpapan dan sebelah selatan Kota Samarinda dengan luas wilayah darat kurang lebih 256.142 hektare dan luas wilayah perairan laut kurang lebih 68.189 hektare. Tersedianya jalan tol diantara kedua kota itu, ada bandara modern, pelabuhan laut serta selesainya jembatan penghubung jalan raya Trans Kalimantan Kaltim-Kalsel, akan mempermudah jalur logistik proses pembangunan Ibu Kota Nusantara.

Bergulirnya kebijakan pemerintah tentang perpindahan IKN memiliki implikasi dalam hal pertahanan negara. Di konteks ini IKN merupakan simbol kedaulatan dan integritas negara yang potensial terhadap segala macam ancaman. Sejarah telah membuktikan, bahwa invasi untuk pendudukan/ocupacy atas suatu negara pasti harus ditunjukkan secara *de facto* dengan mengocupacy ibukota negaranya. Itu sebabnya wilayah IKN merupakan zona strategis pertahanan yang harus dikelola dan dilindungi oleh segenap komponen bangsa. IKN juga merupakan *center of gravity*, karena di situlah pusat dari aktivitas maupun kontrol atas negara dan pemerintahan.

Perpindahan IKN akan mengubah *center of gravity* dengan tetap mengedepankan Pulau Jawa sebagai pusat ekonomi sedangkan IKN di Kalimantan Timur fokus sebagai

pusat pemerintahan. Ditinjau dari strategi pertahanan tentu konsep ini menarik, karena ketika terjadi potensi ancaman dari musuh ini tidak akan langsung menargetkan dua sasaran yaitu ekonomi dan pemerintahan di wilayah IKN. Pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur seharusnya tidak bertumpu pada aspek perekonomian saja, namun juga dari segi aspek sosial, aspek lingkungan, geopolitik, terlebih yang harus diperhatikan dari aspek pertahanan. Sangat penting bagi Indonesia untuk mempertimbangkan langkah yang strategis dalam membangun konsep pembangunan IKN. Ada kekhawatiran terkait potensi tergerusnya budaya setempat dan terpinggirnya masyarakat lokal yang menuntut adanya perencanaan yang serius dari pemerintah pusat untuk menghindari dampak sosial jika wacana pemindahan ibu kota tersebut benarbenar terwujud (Taufik, 2017).

Perlu adanya antisipasi dari semua elemen yang terlibat, baik pemerintah, pakar, maupun media yang berperan penting dalam membangun persepsi dan kesadaran masyarakat akan potensi ancaman yang dihadapi sesuai karakteristik wilayah tersebut. Hal ini karena masyarakat merupakan aktor yang memainkan peran penting dalam pertahanan dan keamanan nasional atau yang lebih kita kenal dengan sistem pertahanan rakyat semesta (*sishankamrata*) (Supriyatno, 2018).

Meninjau dari segi geografi, halaman depan IKN Nusantara adalah ALKI 2 Laut Sulawesi dan Selat Dalam Makassar. Selat merupakan wilayah perairan laut dalam dan terhubung langsung dengan Samudra Pasifik. ALKI 2 merupakan jalur pelayaran internasional termasuk jalur kapal perang dan kapal selam. Khusus untuk kapal selam tonase besar ALKI 2 adalah jalur paling aman untuk "menyusup" karena lautnya sangat dalam. Tak dimungkiri jika kawasan ini menjadi jalur unggulan lintasan kapal selam China, AS, Australia, Jepang dan lain-lain. ALKI 2 dari arah utara ke selatan akan melewati Selat Lombok dan bertemu Samudra Hindia. Artinya halaman depan IKN ini perlu mendapatkan perlindungan berlapis. Demikian juga dengan perbatasan darat, wilayah ini berbatasan langsung ribuan kilometer dengan Malaysia di halaman belakang IKN. Di belakangnya lagi ada Laut Natuna Utara.

Salah satu aspek kajian yang mendukung pemindahan IKN ke Kabupaten Kutai Kertanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara oleh Bappenas, adalah bahwa lokasi IKN yang baru mendukung optimalisasi pertahanan tiga matra. Selain itu, letaknya yang berada di tengah NKRI lebih memudahkan dalam mengorganisasikan dan mengontrol berjalannya fungsi-fungsi pertahanan negara. Untuk itu diperlukannya kapabilitas pertahanan negara, disusun berdasarkan strategi pertahanan negara yang merefleksikan kemampuan, kekuatan, dan gelar kekuatan pertahanan dan sumber daya nasional. Dalam rangka melaksanakannya, kapabilitas pertahanan negara diperlukan untuk dikembangkan guna mencapai standar penangkalan, yakni kapabilitas pertahanan negara yang mampu menangkal dan mengatasi ancaman agresi terhadap kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI dan keselamatan bangsa.

Kapabilitas pertahanan dapat diindikasikan dengan sumber daya material yang dimiliki suatu negara yang dapat ditransformasikan ke dalam kekuatan militer. Tiga hal utama yang menjadi alat untuk menganalisa kapabilitas pertahanan suatu negara menurut Jasjit Singh di istilahkan menjadi 3M Paradigma (*manpower, machine and money*).

Pertama, *manpower* adalah salah satu elemen wajib untuk mengukur kapabilitas pertahanan suatu negara. Secara rinci hal yang penting untuk ditinjau adalah angka keseluruhan dari angkatan bersenjata. Angkatan bersenjata Indonesia diorganisasikan ke dalam tiga matra, yakni Tentara Nasional Indonesia (TNI), yang terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Tugas TNI adalah melaksanakan operasi militer untuk perang, dan operasi militer di masa damai, meliputi:

- a. Mengamankan obyek vital yang bersifat strategis
- b. Mengamankan presiden dan wakil presiden beserta keluarganya
- c. Membantu tugas pemerintahan daerah

- d. Membantu Polri dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam undang-undang
- e. Membantu mengamankan tamu negara setingkat kepala negara dan perwakilan pemerintah asing yang sedang berada di Indonesia
- f. Mengatasi gerakan separatis bersenjata
- g. Mengatasi pemberontakan bersenjata
- h. Mengatasi aksi terorisme
- i. Mengamankan wilayah perbatasan
- j. Melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai kebijakan politik luar negeri
- k. Memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukung secara dini sesuai sistem pertahanan semesta
- l. Membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan
- m. Membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan (*search and rescue*)

Kedua, *machine* merupakan sebuah elemen yang sifatnya juga utama untuk menimbang presentase kapabilitas pertahanan *military equipment* atau peralatan militer atau dikenal juga dengan alat utama sistem persenjataan (alutsista). Menilik dari jumlah dan macam sistem teknologi pertahanan yang dimiliki Tentara Nasional Indonesia (TNI), baik Angkatan Darat (AD), Angkatan Laut, maupun Angkatan Udara (AU).

Ketiga, *money*. *Money* disini dimaksud sebagai elemen untuk menghitung kapabilitas anggaran pertahanan yang merupakan ukuran sumber daya yang diberikan pemerintah kepada angkatan militernya. Anggaran ini bertujuan guna memenuhi biaya perawatan ataupun peningkatan kapabilitas pertahanannya.

Dari aspek pertahanan dan keamanan, Kalimantan Timur memiliki akses serta dukungan darat, laut, dan udara yang cukup strategis. Hal ini sangat diperlukan mengingat salah satu kriteria wajib dari lokasi calon ibu kota negara yaitu memiliki benteng kekuatan pertahanan. Dengan ini terdapat perubahan tata kelola di aspek pembangunan infrastruktur. Di dalamnya dimasukkan rencana pemerintah dalam proyeksi ke depan salah satunya yaitu membangun pangkalan militer tiga matra (darat, laut, dan udara) untuk mendukung penuh keamanan ibu kota baru. Pembangunan pangkalan militer dianggap tepat, karena pangkalan militer itu diperlukan karena lokasi ibu kota baru berbatasan langsung dengan negara tetangga seperti Malaysia.

### **Pertahanan Matra Darat**

Melihat hasil kajian Bappenas dari aspek sosial di IKN yaitu di Kabupaten Kutai Kertanegara dan Kabupaten Penajem Paser Utara menunjukkan bahwa secara sosial memiliki budaya yang relevan terbuka terhadap orang baru. Untuk itu dengan sosial-budaya seperti ini maka kerentanan untuk terjadinya konflik horizontal menjadi aman. Tentu ini hal yang baik/menguntungkan khususnya jika dilihat dalam konteks pembinaan teritorial yang dapat dijalankan TNI-AD.

Pendekatan pertahanan TNI AD di IKN selain memperhatikan aspek fisik (medan), pastinya juga memerhatikan faktor sosial budaya. Kedekatan TNI AD dan rakyat melalui aktivitas sosial dan budaya pada kenyataannya memberikan signifikansi dalam penyelenggaraan ketahanan wilayah. Ini adalah kunci dari pendekatan teritorial TNI AD di mana semua masyarakat bisa didekati dan dibina secara manusiawi, menghindari sekecil mungkin pemberian label lawan/musuh. Hal ini tentu selaras dengan konsep IKN yang mengusung nilai yang humanis, modern, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

Mengingat bahwa IKN itu sebagai *center of gravity* yang harus dilindungi dan sebagai wilayah vital pertahanan, maka peran TNI AD menjadi sangat strategis dalam

konteks pertahanan teritorial. Kompleksitas yang biasanya akan muncul pada *center of gravity* sewaktu-waktu dapat menjadi ancaman yang mesti dihadapi.

TNI AD akan mencakup pertempuran terbuka apabila pasukan musuh telah masuk ke wilayah darat Indonesia. Bentuk pertahanan bervariasi. Pada strategi ini dibutuhkan antara lain: (i) pembentukan Komando Daerah Militer khusus IKN beserta satuan-satuan pendukungnya; (ii) penguatan keamanan di area perbatasan dengan melengkapi pos-pos dan teknologi pengintaian, serta peringatan dini; (iii) koordinasi terhadap lintas matra mengingat kapabilitas angkut strategis merupakan keahlian matra laut dan udara. Kekuatan pertahanan TNI AD di Kalimantan saat ini bersandar pada dua kodam yaitu Kodam Mulawarman di Balikpapan dengan teritori Kaltim, Kalsel dan Kaltara serta Kodam Tanjungpura di Pontianak dengan teritori Kalbar dan Kalteng. Masing-masing Kodam juga memiliki batalyon infantri yang berkualifikasi raider, batalyon armed, kavaleri, arhanud dan skadron penerbang. Dalam waktu dekat ini diprediksi akan dibentuk 1 brigade komposit di IKN seperti halnya yang ada di Natuna. Secara umum sudah ada batalyon infantri raider 600 Modang dan batalyon kavaleri 13 Satya Lembuswana tepatnya di Balikpapan. Di Kutai Kertanegara ada batalyon infantri mekanis 611 Awang Long. Di Berau ada batalyon armed 18 komposit dan skadron 13 helikopter penerbang. Di Tarakan ada batalyon raider 613 Raja Alam dan juga di Malinau ada batalyon raider 614 Raja Pandita, batalyon kavaleri 13, batalyon armed 18, batalyon infantri mekanis 611, batalyon armed 18, dengan adanya ini tentu TNI mengupayakan bentuk strategi yang optimal dan efektif guna menciptakan pertahanan yang stabil

### **Pertahanan Matra Laut**

Sistem pertahanan maritim sangat penting menjadi prioritas utama dalam pemindahan ibu kota negara. Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut adalah bagian dari TNI yang mempunyai tugas berdasarkan UU RI No. 34 Tahun 2004 Pasal 9, salah satu tugasnya adalah “menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah

diratifikasi". Terkait dengan teori peran Angkatan Laut, TNI AL memiliki andil yang besar untuk menjaga kedaulatan laut yang menurut Ken Booth memiliki tiga fungsi, yaitu fungsi militer, polisionil dan diplomasi apabila dihubungkan dengan pemindahan ibu kota negara, ketiga fungsi tersebut memiliki peran penting terutama dikaitkan dengan pertahanan maritim.

Guna memperkuat teknologi pertahanan maka TNI AL dalam hal ini Dinas Komunikasi dan Elektronika Angkatan Laut harus melaksanakan kerjasama dengan Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika. Kerjasama ini menjadi waktu yang pas, baik bagi Ditjen SDPPI maupun TNI Angkatan Laut, untuk bersinergi mewujudkan kesiapan Indonesia menghadapi peperangan di dunia elektronika.

Wilayah Ibu Kota Nusantara (IKN) secara geografis terletak di pulau Kalimantan, wilayah perairan lautnya seluas kurang lebih 68.189 ha (enam puluh delapan ribu seratus delapan puluh sembilan hektare). Untuk itu pertahanan aspek laut melalui peran TNI AL sangat dominan dimana sistem pertahanan saat ini sudah menggunakan basis *smart defense* dan antara alutsista yang melaksanakan pertahanan di laut sudah terintegrasi data internal serta eksternal dalam jaringan komunikasi. Ini terdiri dari data internal strategi pertahanan perencanaan pertahanan, kekuatan pertahanan, potensi pertahanan, dan sarana pertahan serta terintegrasi pula dengan data yang didapat dari Mabes TNI AL.

Kesiapan kekuatan angkatan laut di jalur ALKI 2 selat Makassar dan laut Sulawesi saat ini bertumpu pada Armada Dua yang bermarkas di Surabaya. IKN Nusantara yang berhadapan dengan ALKI 2 harus mendapat perlindungan laut melihat adanya titik panas Ambalat di halaman perairan. Saat ini Ambalat dalam kontrol penuh TNI AL namun untuk perkuatan pertahanan laut di ibukota negara harus ada kapal perang kelas korvet ke atas yang ber *home base* di Balikpapan atau Samarinda. Mengingat Laut Sulawesi yang sangat

terbuka, ada Sabah, Filipina dan Samudra Pasifik di depan ibu kota. Termasuk mengantisipasi potensi teroris di segitiga Sulu, Sabah dan Poso.

### **Pertahanan Matra Udara**

Dalam menghadapi ancaman keamanan di udara, TNI Angkatan Udara berperan penting dalam mempertahankan kedaulatan wilayah udara NKRI. Menurut Pasal 10 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, tugas TNI Angkatan Udara antara lain melaksanakan di bidang pertahanan, penegakan hukum, pemeliharaan keamanan yurisdiksi nasional, melaksanakan tugas TNI dalam pembinaan angkatan udara, dan pemberdayaan wilayah pertahanan udara. TNI Angkatan Udara wajib berupaya semaksimal mungkin guna menghasilkan kondisi wilayah udara yang aman. Hal tersebut dapat diwujudkan sebagai bentuk pelaksanaan tugas tersebut dalam kegiatan Operasi Militer Perang (OMP) dan Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Hal ini tercantum dalam penjelasan Pasal 8 ayat 1 UU No.1 Tahun 2009, dalam kasus pelanggaran wilayah udara, diperlukan kekuatan nyata TNI Angkatan Udara untuk menyelesaikan kasus pelanggaran di wilayah udara. (Savitri & Prabandari, 2020)

Untuk menjaga kedaulatan di wilayah udara, keamanan wilayah udara yang maksimal adalah suatu keharusan karena tanpa itu kedaulatan negara akan terancam serangan dari pihak lain. Oleh karena itu, untuk mencapai keamanan wilayah udara nasional yang maksimal TNI Angkatan Udara sebagai pelaksana tanggung jawab menjaga kedaulatan wilayah udara nasional dan penegakan hukum harus terakomodasi dalam segala kepentingannya.

Meninjau dari wilayah punggung ibukota nusantara, diperlukan perlindungan ketat dan harus dapat diantisipasi dari serangan udara dan serangan peluru kendali jarak jauh dari musuh. Kemungkinan arah serangannya tiba dari arah Laut China Selatan dan Laut China Timur, jika terjadi perang terbuka maka Tenggara, Melak dan Muara Teweh mungkin bisa pilihan silo pertahanan udara dan silo pertahanan anti rudal jarak jauh. Bersinergi dengan skadron jet tempur Rafale yang mungkin akan ditempatkan

Supadio AFB Pontianak dan jet tempur Sukhoi di Hasanuddin AFB Makassar. Sebagai penguat di wilayah Samarinda atau Tarakan bisa di bangun *home base* 1 skadron jet tempur F16. Oleh karena itu kekuatan pertahanan udara jarak jauh mobile di Kalimantan bertumpu pada 2 skadron jet tempur Rafale dan F16, 1 skadron UAV yang sudah berada lama di Supadio AFB. Kendaraan udara tak berawak (UAV) juga dikenal sebagai "drone" dianggap sebagai bagian dari teknologi mutakhir dan multifaset saat ini. Teknologi ini masih ada pada tahap awal adopsi dan percobaan secara luas. Unmanned Aerial Vehicle (UAV) merupakan teknologi mutakhir yang dapat digunakan untuk keperluan militer, publik, dan sipil.

Penggunaan pesawat tanpa awak (UAV) untuk berbagai keperluan yang dinilai murah dari segi operasional memberikan kesan bahwa negara-negara berlomba-lomba dalam pembangunan. Untuk negara dengan wilayah daratan dan perairan yang luas seperti Indonesia, penggunaan teknologi drone khususnya untuk keamanan kawasan sangat ideal terutama dalam hal sulitnya menjangkau lapangan di darat dan di laut. Kebutuhan militer Indonesia akan drone saat ini menjadi salah satu yang paling utama, karena kehadiran drone militer berbagai jenis misi akan dapat diselesaikan dengan teknologi yang canggih. Indonesia harus menambah jumlah drone UAV-nya, terutama yang berkualitas HALE. HALE adalah jenis UAV untuk waktu lebih lama agar dapat menjalankan misi pengawasan secara efisien guna menjaga wilayah udara di sekitar IKN.

## **5. SIMPULAN**

Perpindahan ibu kotanegara tentunya memberikan dampak terhadap pertahanan, keamanan, dan keselamatan di sekitar wilayah IKN. Letak yang strategis tersebut mengharuskan dibuatkannya suatu sistem *smart defense* yang saling terhubung antara lembaga terkait dengan TNI sebagai pelaksana tugas pengamanan di IKN. Ibu kota merupakan *center of gravity* yang berkedudukan penting mendukung keberlangsungan

negara. Oleh karena itu, pertahanan ibu kota perlu didukung dengan gelar-gelar yang mampu mengantisipasi potensi ancaman yang akan datang.

Pemindahan IKN membuat kebutuhan transformasi gelar kekuatan TNI karena *center of gravity* pemerintahan akan berpindah posisi dari Jawa ke Kalimantan. Selain itu IKN juga rentan terhadap agresi dari negara asing. Posisi wilayah IKN berada di garda terdepan pertahanan nasional. Secara historis, lokasi IKN merupakan salah satu wilayah yang diinfiltrasi oleh Jepang di era Perang Pasifik. Gelar kekuatan militer negara-negara adidaya di Indo-Pasifik juga harus dinilai sebagai potensi yang mengancam. Wilayah IKN masuk dalam radius tiga kapabilitas militer Amerika Serikat yaitu pesawat pembom, pesawat jet tempur, dan rudal jelajah. Dilihat dari lain sisi wilayah IKN juga masuk dalam radius rudal balistik, pesawat jet tempur, dan pesawat pembom Tiongkok. Tidak hanya itu pangkalan militer AS yang ada di Samudra Pasifik sampai Australia juga akan berpotensi menjadi ancaman.

Diperlukan penambahan kekuatan dan penambahan jumlah unsur gelar pada Kodam, Lanal dan Lanud guna dapat mendukung aspek pertahanan di wilayah IKN yang berada di Kalimantan, yang diharapkan tingkat atau strata organisasi, jumlah personel dan alutsista yang diperbarui berdasarkan analisa ancaman yang berpotensi muncul yang akan mengganggu stabilitas pemerintahan. Peningkatan kekuatan pertahanan, keamanan, dan keselamatan di laut, darat dan udara dapat dimaksimalkan dengan melakukan intensitas terhadap patroli wilayah, kesiapan tiga matra armada dan personel di sekitar wilayah IKN dapat mengoptimalkan pertahanan dan keamanan.

## REFERENSI

Creswell, J. W. (2003). *Research Design Qualitative, Quantitative, and Mix Methods Approaches* (2nd ed). California: Sage Publishing.

- Creswell, John W. (2008). *Research Design, Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*, Bandung: Edisi Ketiga Pustaka Pelajar
- Savitri, R. N. R., & Prabandari, A. P. (2020). TNI Angkatan Udara dan Keamanan Wilayah Udara Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(2), 236–245.
- Saputra, S. D., J, T. G., Halkis, M., Studi, P., Pertahanan, E., Pertahanan, F. M., & Pertahanan, U. (2021). Analisis Strategi Pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Pertahanan ( Studi Kasus Upaya Pemindahan Ibu Kota Negara Dari Dki Jakarta Ke Kutai Kartanegara Dan Penajam Paser Utara ) Strategy Analysis Relocation of the Capital C. *Jurnal Ekonomi Pertahanan*, 7(2), 192–220.
- Maharani, Curie, dkk. (2022). *Pertahanan Ibu Kota Negara Strategi dan Gelar Militer*. Jakarta: Laboratorium Indonesia 2045.
- Putro, Herlambang Suryo dan Sumiyat. (2022). “Peran TNI AL dalam Penegakan Hukum dan Keselamatan di Laut Guna Mendukung Perpindahan Ibu Kota Negara dalam Rangka Mewujudkan Poros Maritim Dunia”. *Jurnal Maritim Indonesia*, Agustus 2022, Volume 10 Nomor 2, 118-131.
- Witjaksono, Tatit Eko. (2020). Mewujudkan Tata Ruang Wilayah Pertahanan Maritim Guna Menjaga Keutuhan Wilayah NKRI, diakses 16 Desember 2023, <https://seskoal.ac.id/artikel/23>
- Al-Biruni. (2022, Januari 28). Menahami Strategi Pertahanan Ibu Kota Nusantara Indonesia (Video file). Youtube. <https://youtu.be/bqvAysV44N8?si=JAlb-s5ArBA-9L5B>

Hutagalung, Siti Merida. "Penetapan Alur Laut Kepulauan Indonesia(ALKI): Manfaatnya Dan Ancaman Bagi Keamanan Pelayaran Di Wilayah Perairan Indonesia." *Jurnal Asia Pacific Studies* 1, no. 1(2017): 75.

Wijanarka, D., & Musani, I. (2022). Manajemen Sumber Daya Manusia Guna Meningkatkan Kemampuan Tni Angkatan Laut Indonesia Yang Modern Di Revolusi Industri 4.0. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 9(3), 494- 501.